

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peran sumber daya manusia dalam implementasi sistem pengendalian intern di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan peran sumber daya manusia yang menghambatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang ada pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan aktifitas pengendalian yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 seperti :

- 1) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab : belum sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 karena masih ada beberapa pegawai yang masih melakukan kecurangan terkhusus pada bidang anggaran.
- 2) Identifikasi Risiko : masih ada pegawai-pegawai yang melengkapi data-data dengan cara yang salah.
- 3) Analisis Risiko : belum sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 karena masih banyak pegawai yang menolak untuk mengurus SPIP yang menyebabkan analisis risiko tidak berjalan dengan baik.
- 4) *Review* atas kinerja : review atas kinerja belum sepenuhnya optimal karena peran SDM dalam tugasnya belum berjalan dengan seharusnya & perlu menetapkan pegawai/ASN sesuai bidang kompeten yang dimiliki serta dilakukanya peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis pada setiap bidang.

- 5) Otoritas atas transaksi dan kejadian : beberapa pegawai belum yakin terhadap kemampuannya sendiri yang menyebabkan mengalihkan tanggung jawab.

6.2 Saran

Melalui Penelitian tentang Analisis Peran Sumber Daya Manusia dalam Implementasi sistem pengendalian Inter Pemerintah dalam meningkatkan implementasi SPIP di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, beberapa langkah perlu dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao. Pertama, harus ada peningkatan dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dengan memastikan pegawai yang bertanggung jawab mempunyai integritas dan kompetensi yang tinggi, terutama di bidang anggaran. Kedua, perlu di lakukannya perbaikan proses identifikasi risiko dengan memberikan pelatihan yang tepat agar pegawai dapat melengkapi data dengan benar. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai terhadap SPIP, sehingga analisis risiko dapat berjalan dengan baik. Keempat, evaluasi kinerja harus dilakukan lebih optimal dengan meningkatkan peran SDM dalam pelaksanaan tugasnya. Dan terakhir, perlu ada peningkatan kepercayaan diri pegawai terhadap kemampuan mereka, sehingga tidak ada pengalihan tanggung jawab yang tidak seharusnya.